

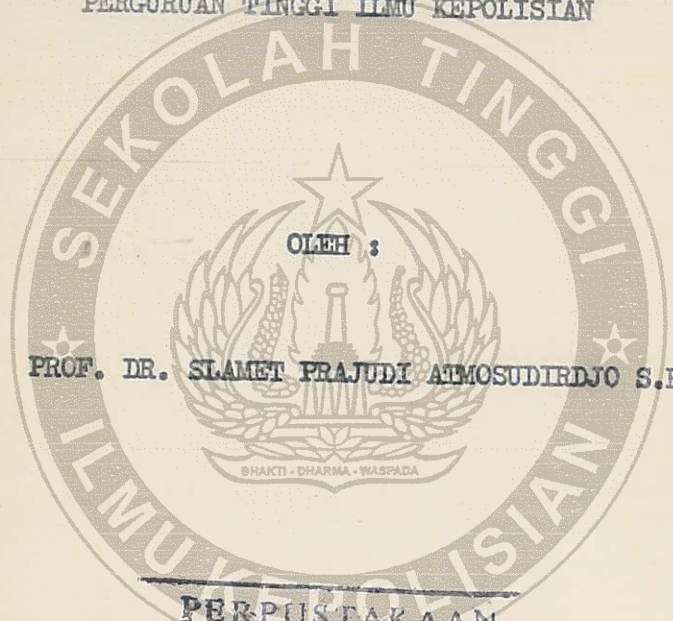
363.352
Atm
P.c. 1.

PIDATO DIES NATALIS

DALAM RANGKA

MEMPERINGATI HARI JADI YANG KE: XXX

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN



OLEH :

PROF. DR. SLAMET PRAJUDI ATMOSUDIRDJO S.H.

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN

JAKARTA, 17 JUNI 1976

PENTINGNYA STUDI TENTANG KONFLIK SEBAGAI
SALAH SATU SUMBER GANGGUAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN
ILMU KEPOLISIAN DALAM RANGKA Mendukung
Pembangunan Nasional Indonesia

Setelah berhasilnya Pembangunan Lima Tahun Pertama (PELITA I), maka kini kita berada dalam tahap permulaan PELITA II yang akan berakhir pada tahun 1979.

Keunikan daripada Pembangunan Lima Tahun kita, dibandingkan dengan di negara-negara lain serta uraian-uraian tentang Pembangunan yang terdapat di dalam literatur luar negeri, adalah bahwa Pembangunan Nasional Indonesia itu mempunyai tiga tujuan sekaligus yang satu sama lain berkaitan, yakni : (1) meningkatkan Ketentraman Hidup Bangsa dan Negara, melalui penyempurnaan daripada Organisasi Negara, Administrasi Negara, Peradilan, dan Angkatan Bersenjata, (2) meningkatkan Kesejahteraan Hidup Bangsa dan Negara, melalui penyempurnaan daripada Pendidikan, peningkatan karya-karya Kebudayaan dan Kesenian, pembangunan tempat-tempat ibadah dalam rangka memperkuat Agama, perbaikan fasilitas Perumahan, Kesehatan Rakyat, dan Jaminan Sosial, dan (3) meningkatkan Kemakmuran Hidup Bangsa dan Negara, melalui peningkatan daripada usaha-usaha di bidang ekonomi pada

umumnya, terutama Pertanian, Pertambangan, Perbankan dan Ekspor, serta Komunikasi dan Pengangkutan.

Inti daripada Pembangunan adalah modernisasi. Modernisasi bukanlah westernisasi, melainkan pada hakekatnya merupakan penerapan daripada ilmu pengetahuan yang mengandung unsur Rasionalitas Sistematis dan Rencana lebih banyak kedalam semua segi dan bidang kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Modernisasi sui generis pada umumnya bertentangan dengan Tradisi dan Adat.

Akibat daripada gerakan Pembangunan tersebut adalah terjadinya perubahan-perubahan yang serba cepat, yang makin lama makin cepat dan makin meluas, ibaratnya gerak suatu lawine, yakni gumpalan salju yang turun dari puncak gunung, semula merupakan bebatuan kecil dan bergelembung secara pelan, namun, makin lama makin cepat dan menjadi makin besar, tiada yang dapat menahan geraknya, kecuali suatu lembah atau jurang yang dapat menceraikan beraikannya dan menghentikannya.

Akan tetapi, proses perubahan-perubahan serba cepat dan meluas tersebut tidak hanya berlangsung di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, lebih-lebih dengan makin banyak satelit-satelit komunikasi, siaran-siaran radio dan televisi, filem-filem, kursus-kursus bahasa asing, buku-buku, dan majalah -

majalah serta surat-kabar surat-kabar beraneka ragam dan aliran, serta pesawat-pesawat penumpang serba cepat yang membawa pertukaran rombongan-rombongan parawisatawan, niagawan-niagawan, pejabat-pejabat negara, dan sarjana-sarjana serta ahli-ahli. Kesemuanya itu membuat muka bumi ini makin berubah; orang bingung mencari tempat berdiam yang tidak berisik, tidak bising, tidak bau gas beracun, yang mengganggu pikiran dan kesehatan manusia pada umumnya.

Perubahan-perubahan tersebut di atas merupakan perubahan cara berpikir, perubahan norma-norma dan nilai-nilai hidup, perubahan tata-kesopanan yang menyangkut tata-cara pergaulan, bahasa, sikap dan tingkah-laku, serta cara berpakaian, perubahan dalam memu-makanan dan hobby atau rekreasi, perubahan dalam pandangan terhadap agama dan perkawinan, dan perubahan dalam aspirasi serta cita-cita hidup.

Proses perubahan-perubahan tersebut berlangsung dengan disertai adanya pertentangan-pertentangan atau konflik-konflik antara berbagai macam pihak mengenai berbagai macam kepentingan dan persoalan pula, dan sebagian daripada konflik-konflik tersebut terjadi dengan disertai penggunaan kekerasan.

Kita telah mengetahui sebelumnya, bahwa gerakan Pembangunan Negara itu akan disertai dengan, dan akan mengakibatkan pula, adanya konflik-konflik, di samping konflik-konflik yang ada di luar bidang

Pembangunan, oleh sebab Pembangunan di jalankan melalui Rencana-Rencana Pembangunan dan setiap Rencana musti mempunyai pro dan kontra, terutama dari segi harapan dan kenyataan. Di dalam menyusun Rencana Rencana Pembangunan tersebut sudah barang tentu kita harus menetapkan prioritas-prioritas, dan dalam hal inilah Pemerintah (baca: Administrasi Negara) secara otomatis akan menghadapi dilemma-dilemma yang sejak abad yang lampau selalu menjadi masalah-masalah struktural dalam penentuan Kebijaksanaan dan pengambilan Keputusan-Keputusan, yakni: adanya keterlawanan-keterlawanan yang mudah menimbulkan konflik konflik, yaitu kontradiksi-kontradiksi:

- (1) antara Kepentingan Negara -- dan -- Hak-Hak Asasi Warga Negara,
- (2) antara Kepentingan Umum -- dan -- Vested Interests,
- (3) antara Kebutuhan sekarang -- dan -- Kebutuhan masa mendatang,
- (4) antara menjunjung tinggi Tradisi dan Adat -- dan -- Rasionalitas daripada modernisasi (Pembangunan).

Secara berlebih-lebihan mengutamakan Kepentingan Negara akan mendesak dan mengurangi hak-hak kebebasan asasi para warga masyarakat dan negara mengurangi semangat berprakarsa, dan memperlemah partisipasi, dan sebaliknya.

Secara berlebih-lebihan mengutamakan Kepentingan

Umum akan mengurangi gairah investasi para pemilik modal yang selalu merupakan "vested interest", dan sebagai konsekwensi akan mengurangi masuknya pajak ke dalam Kas Negara, dan sebaliknya.

Rencana Pembangunan selalu mengenai kebutuhan-masa mendatang, akan tetapi secara berlebihan memikirkan kebutuhan masa mendatang saja, akan menimbulkan kemarahan pada masyarakat yang merasa penderitaannya dan kepentingan-kepentingannya tidak merapat perhatian, dan sebaliknya.

Pembangunan berarti modernisasi. Modernisasi memerlukan cara berpikir dan pandangan hidup yang di sana sini akan berlawanan dengan ajaran-ajaran adat dan tradisi, apa lagi jikalau ada hubungannya dengan tradisi pengajaran agama dan kesusilaan. Masalahnya adalah bagaimana mencegah jangan sampai timbul konflik-konflik yang serius. Pendidikan "development consciousness" dan "development thinking" tidak jarang akan menimbulkan kebingungan pada para "development agent" yang menghadapi realitas kehidupan tata-hukum dan tata-sosial sehari-hari, dan tindak-tanduknya malahan menimbulkan frustrasi pada para pejabat penegak hukum.

Di balik itu, Pembangunan Nasional Indonesia - itu merupakan sesuatu yang mutlak harus kita lakukan dengan segala bawasanya. Jikalau tidak, maka akibatnya malahan akan lebih menghancurkan kita, baik se-

bagai Bangsa maupun sebagai Negara Republik Indonesia.

Menghadapi situasi yang demikian itu, maka kita pada hari ini bertanya sampai di manakah Ilmu Kepolisian dapat mendukung Pembangunan Nasional Indonesia, agar supaya dapat dicapai sukses yang sebesar-besarnya dengan korban meril, kulturil, dan materiil yang sekecil-kecilnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka sebelumnya beberapa hal atau pengertian harus di pertegas.

ILMU KEPOLISIAN, walaupun pengembangannya di Indonesia baru mencapai 30 (tigapuluh) tahun, dan sudah mulai mempunyai tradisi ilmiah berupa terminologi dan metodologi, serta sistimatik dan problematik daripada materinya yang tertentu, pada setiap Dies Natalis harus dijadikan topik yang sentral terutama agar supaya para Sarjananya yang telah dihasilkan selama tiga puluh tahun tersebut, bisa lebih aktif lagi menyumbangkan sesuatu ke arah memperkaya KEPUSTAKAAN dan PERPUSTAKAAN ILMU KEPOLISIAN kita. Oleh karena, walaupun Ilmu Kepolisian sebagai disiplin ilmu pengetahuan tidak sendirian dalam hal ini, salah satu kelemahan yang sangat dirasakan dalam tradisi ilmiah tersebut di atas adalah pada Kepustakaan dan Perpustakaan aseli Indonesia. Sebagian besar daripada isi perpustakaan kita masih berupa bu-

ku-buku ilmiah asing, yang ditulis dan dikomunikasikan oleh penulis-penulis untuk keperluan dan di tengah-tengah masyarakat-masyarakat serta lingkungan-lingkungan asing, yang kebanyakan sangat besar perbedaan kondisinya dengan masyarakat Indonesia. Lebih mengemukakan lagi dilihat dari segi penguasaan materi-serta manfaatnya, adalah buku-buku asing yang di terjemahkan oleh orang-orang yang tidak menguasai kedua bahasa dan kebudayaan yang menjadi ajungnya. Menterjemahkan sesuatu buku ilmu sosial tidaklah hanya menterjemahkan kata-kata, melainkan juga menterjemahkan jiwanya, nilai-nilai budayanya, menjelaskan proses historisnya, menjelaskan dukunya masalah-masalah dan aspirasi-aspirasi di dalam ajangan-ajangan yang asing bagi para Mahasiswa kita. Buku-buku dan studiematerial dari Indonesia yang disiapkan oleh para Sarjana Indonesia harus lebih banyak lagi, agar supaya buku-buku asing itu hanya berfungsi sebagai bahan perbandingan dan sumber untuk memperoleh ide-ide, metode-metode, teknik-teknik, dan pola-pola pendekatan baru. Terlampaui mengutamakan buku-buku asing di dalam Ilmu Sosial, termasuk Ilmu Kepolisian, akan menghasilkan sarjana-sarjana yang terasing dari masalah-masalah riil daripada Masyarakat, Bangsa, dan Negara mereka.

Kita selalu ingat, bahwa Ilmu Kepolisian bukan lah sekedar "pengetahuan" tentang "Kepolisian", oleh

karena kita mengetahui, bahwa Ilmu Pengetahuan itu bukan semata-mata Pengetahuan. Kita mengetahui, bahwa ilmu pengetahuan atau science atau wetenschap - itu mempunyai tiga arti yang berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi satu, yakni:

- (1) ilmu pengetahuan adalah kemampuan berpikir rasional tingkat tertinggi,
- (2) ilmu pengetahuan adalah sistim atau metodologi untuk menemukan, menguasai, dan menerapkan pengetahuan (yang setiap kali harus diperbaharui, dicari dan diciptakan, oleh sebab segala sesuatu di dunia ini berubah terus), dan
- (3) ilmu pengetahuan merupakan suatu bingkai-referensi, suatu "frame of reference", sesuatu bingkai atau teropong yang terdiri atas pengetahuan-pengetahuan dasar (pengertian-pengertian dan hukum-hukum) tertentu yang dirangkai atau dirakit secara sistimatis-logis, dan dipakai untuk memandang terhadap dunia realitas yang mengelilingi kita.

Ilmu Kepolisian adalah ilmu pengetahuan tentang "Kepolisian", bukan ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang POLRI. Ilmu Kepolisian dikembangkan antara lain, untuk memberikan dasar yang kuat dan untuk meningkatkan mutu daripada setiap Pejabat yang harus menjalankan fungsi kepolisian (Ilmu Kepolisian Praktika), terutama para Pejabat atau

Perwira POLRI, dan untuk memberikan pengertian yang sistimatis-ilmiah kepada setiap peminat tentang "Kepolisian" baik a) sebagai fenomenon dan fungsi masyarakat yang tertib, b) sebagai fungsi pengendalian konflik, c) sebagai proses, d) sebagai profesi, dan e) sebagai keahlian khusus (expertness).

Ilmu Kepolisian adalah ilmu pengetahuan mengenai "Kepolisian", ilmu pengetahuan yang menjadikan "Kepolisian" sebagai obyek studinya, dan bukan ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).

Memang harus diakui, bahwa hingga kini yang menarik manfaat terbesar dari Ilmu Kepolisian yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini adalah pihak penyelenggaranya, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, sebagai prinsip, Ilmu Kepolisian itu dikembangkan untuk memperkaya Dunia Ilmu Pengetahuan Indonesia pada umumnya, yang harus dikembangkan oleh kita bersama sebagai dasar daripada Dunia Kebudayaan Indonesia Modern sebagai bagian dari Dunia Modern. Dan untuk itu kita harus menjaga jangan sampai hanya bagian Ilmu Kepolisian Praktiknya saja yang mendapat perhatian, oleh karena pengembangan sesuatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan hanya dapat berlangsung dengan baik jikalau didukung oleh Filosofinya dan Ilmu Pengetahuan Teoretiknya, dan hal ini hanya mungkin jikalau dilakukan-

hasil ragasah secara teratur dan bertahap.

Sarjana-sarjana yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi yang terlampau menitik beratkan pada bagian ilmu pengetahuan praktiknya (applied science, terapanse wetenschap) pada suatu ketika di dalam praktik akan mengalami jalan buntu, oleh karena mereka kurang bekal filsafat dan teori untuk mengenali secara terus-menerus perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan atau masyarakat di mana hidupnya mereka harus bekerja. Filsafat dan teori - itu harus dikembangkan di Indonesia dan berdasarkan kenyataan-kenyataan Masyarakat Indonesia sendiri. Penerimaan teori-teori dari buku-buku asing, dan hal ini berlaku pula bagi Ilmu-Ilmu Eksakta, tanpa pengertian dan penghayatan ~~dan~~ daripada CAKRA Masyarakat dan Negara Indonesia akan mengakibatkan bahaya dihasilkan sarjana-sarjana yang "tumpang" dari bangsa dan negaranya sendiri.

Di dalam rangka menarik perhatian terhadap pentingnya pengantrengan dari pada Filsafat Kependidikan dan Ilmu Kependidikan Teoretis, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia - PELITA II dan selanjutnya, pada hari ini saya ingin menohon perhatian Saudara-Saudara akan pentingnya - studi tentang KONFLIK.

Di atas telah saya kemukakan, bahwa usaha Penguatan Nasional kita secara dengan sendirinya meny

wa dan menimbulkan konflik-konflik. Sebagian dari-pada konflik-konflik tersebut terjadi atau akan ber-langsung dengan disertai kekerasan (geweld, violen-ce), maka terjadilah gangguan terhadap Keamanan Ma-syarakat (gangguan Hukum) atau terhadap Keamanan Ne-gara (gangguan Kedaulatan Negara). Tindakan terha-dap gangguan Hukum adalah Tugas Kepolisian, tindakan terhadap gangguan Kedaulatan adalah Tugas Pertahanan (Defensi).

Dari segi masalah Konflik, maka semoga jelaslah betapa perlunya kita di Indonesia selekasnya meres-mikan pengembangan daripada Ilmu Pertahanan (the - Science of Defence) di samping pengembangan daripa-da Ilmu Kepolisian.

Dalam rangka ini Ilmu HANKAM yang dapat terdi-ri atas Ilmu Pertahanan dan Ilmu Kepolisian di da-lam konteks kebutuhan Bangsa dan Negara Indonesia-yang akan datang, menurut hemat saya, harus lebih banyak menaruh perhatian, tenaga, dan biaya terha-dap studi tentang konflik-konflik sosial, budaya, - ekonomi, dan politik (yang secara otomatis akan me-nyangkut hukum) yang terjadi di Indonesia khususnya, di kawasan Asia Tenggara umumnya. Apa yang terjadi di Malaysia, Thailand, dan Filipina dewasa ini, mi-salnya, perlu mendapatkan perhatian sarjana-sarjana kita yang bersangkutan bidangnya, agar supaya kita dapat menarik manfaat dari studi-studi mereka dan

mencegah terjadinya konflik-konflik semacam yang -
terdapat dalam tiga negara sesama ASEAN tersebut -
di atas, di Indonesia sendiri.

Pada sebagian dari kita masih terdapat kecenderungan untuk memandang terhadap perbuatan-perbuatan pidana, seperti prostitusi, korupsi, narkotika, penyelundupan, dan sebagainya, dari sudut yang sempit (kebanyakan dari segi akhlak), sehingga tidak mencapai hasil yang memuaskan di dalam daya-upaya-pengatasannya.

Dari hasil studi tentang konflik yang dilakukan di Jerman Barat, misalnya, yang pernah saya baca dalam majalah-majalah, saya kira kita harus memandang terhadap perbuatan-perbuatan pidana itu sebagai konflik, mungkin konflik perorangan, mungkin konflik sosial, mungkin konflik sosietaI, mungkin-konflik struktural.

Dalam konflik perorangan seorang melakukan -
perbuatan pidana karena konflik yang terjadi di dalam dirinya sendiri.

Dalam konflik sosial seorang melakukan perbuatan pidana sebagai efek atau reaksi negatif terhadap apa yang dia alami dalam kehidupan pergaulan - masyarakat sehari-hari.

Dalam konflik sosietaI seorang melakukan perbuatan pidana sebagai seorang warga masyarakat yang sedang konflik dengan masyarakat (atau golongan ma-

syarakat) lain.

Dalam konflik struktural seorang melakukan suatu perbuatan pidana karena digiring, dipaksa, oleh struktur di mana dia berada, sedangkan setiap orang di dunia ini ingin hidup (ingin survive).

Hingga kini Kriminologi dan Psikologi pada umumnya memandang terhadap "kejahatan" itu dari segi orang-perorangan. Studi tentang konflik dan juga-praktek menunjukkan, bahwa "orang baik-baik" (artinya: orang normal, dan menurut psikotest orang yang tidak mungkin melakukan kejahatan) pun dapat melakukan perbuatan pidana terdorong oleh situasi yang tidak mampu dia "menahannya", misalnya: seorang melakukan "pemerasan dengan menyalahgunakan jabatan" oleh karena dia harus menyeter sejumlah uang tetap setiap bulan kepada atasan; seorang melakukan penghinaan, bahkan pembunuhan, terhadap kawannya sendiri karena "perintah" organisasi di mana dia menjadi anggota yang harus angkat sumpah sesuai dengan ideologi atau ajaran yang diamut dan diperjuangkan.

Di samping itu masih terdapat pula perbuatan-perbuatan pidana, misalnya: penculikan, hijack, yang berlatar belakang "protes" atau "keinginan untuk didengar suaranya atau keluh-kesahnya" namun struktur masyarakatlah yang menghalang-halangi mereka untuk berkomunikasi secara normal menurut saluran-saluran serta memakai bahasa biasa.

Dari contoh-contoh tersebut di atas semoga jelaslah apa yang saya maksud, dengan studi tentang konflik.

Pelaksanaan PELITA sudah barang tentu membawa serta berbagai macam konflik, baik yang bersifat ideologis-politis maupun yang bersifat yuridis-keamanan, yang bersifat sosial-ekonomis, dan yang bersifat budaya-religius.

Yang relevant bagi Pidato Dies hari ini adalah Studi tentang Konflik yang bersifat Yuridis-Keamanan, dengan catatan, bahwa konflik-konflik ideologis politis sosial-ekonomis dan budaya-religius yang dilakukan secara kekerasan otomatis menjadi "konflik yuridis-keamanan", sedangkan konflik-konflik semua itu jikalau dilakukan secara berorganisasi yang membahayakan atau mengancam "Kedaulatan/Kemerdekaan Negara" otomatis menjadi masalah Pertahanan, dan pada waktu ini Departemen HANKAMlah yang menangani masalah-masalah Konflik-Konflik tersebut didalam rangka sistim HANKAMNAS secara menyeluruh.

Penanganan konflik-konflik tersebut di atas tidaklah mudah, terutama dengan mengingat situasi dunia internasional dan kedudukan Indonesia masa kini lebih-lebih bilamana kita memperhatikan perkembangan daripada "local wars" di Laos, Thailand, Birma, Malaysia, dan Filipina.

Dalam menghadapi masalah-masalah konflik yang

bersifat yuridis-keamanan tersebut di atas kita harus mempunyai organisasi yang cukup efektif, yakni

(1) organisasi yang melakukan studi dan analisa secara :

(a) ilmiah, untuk menyusun filosofi dan teori - guna memunjang tindakan-tindakan serta studi dan analisa praktis,

(b) praktis, untuk menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta rencana-rencana tindakan - operasional;

(2) organisasi pencegahan konflik-konflik melalui - bimbingan, perundingan, penerangan, dan pendid - dikan;

(3) organisasi pemecahan konflik-konflik, melalui - arbitrase, pengaturan, dan peradilan perdamaian (vredesrechter, hakim damai) dan

(4) organisasi pengendalian konflik, yang bersifat - polisionil, di mana POLRI harus memegang peranan yang penting.

Pada dasarnya, mengingat luasnya persoalan, maka Studi dan Analisa Konflik termaksud di atas ha - rus dilakukan secara interdisipliner dan kerjasama- antar instansi.

Namun demikian, di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sebaiknya dibentuk suatu "Lembaga - Risets Pertikaian" yang mengadakan studi dan anali - sa ilmiah tentang konflik-konflik, terutama yang -

bersifat konflik sosietaI dan konflik struktural , dengan bekerjasama dengan fakultas-fakultas serta-instansi-instansi yang berkepentingan.

Dengan penanganan yang sistimatis, maka banyak konflik yang dibawa oleh pelaksanaan Pembangunan Nasional kita dapat diperlemah efeknya, dapat diisoler, bahkan banyak yang dapat dicegah timbulnya.

Yang penting sekali adalah, bahwa kita dapat "mengenal" konflik-konflik menurut jenis dan wataknya, dapat "mentrasir" dan menemukan konflik-konflik yang seringkali bersifat latent, dan dapat bertindak (dalam bentuk apa pun) terhadap konflik konflik sebelum timbul kerugian yang besar dan membahayakan.

Dengan studi tentang konflik itu kita dapat menambah kegunaan daripada Ilmu Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian serta mendukung pelaksanaan daripada Pembangunan Nasional Indonesia, khususnya PELITA II dan seterusnya.

Demikianlah uraian saya secara singkat dan sederhana, semoga bermanfaat adanya.

Jakarta, 17 Juni 1976.

Prof.Dr.Slamet Prajudi Atmosudirdjo.S.H.



